

## EVALUASI KEBIJAKAN DANA KAMPUNG DAN ALOKASI DANA KAMPUNG MENGGUNAKAN *LOGIC MODEL*

Adrianus<sup>1</sup>, Muhammad Jamal Amin<sup>2</sup>, Rulinawaty<sup>3</sup>

Universitas Terbuka<sup>1,2,3</sup>  
hemaqbeniung@gmail.com<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan *logic model*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian, dana Kampung di Kampung Muara Asa digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan kampung setiap tahun, pembangunan jembatan kampung, pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor Pemerintahan Kampung, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sumber air bersih, pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan prasarana jalan seperti selokan, dan pembangunan jamban umum (MCK). Alokasi Dana Kampung digunakan untuk peningkatan pelayanan Pemerintah Kampung dengan cara membangun sarpras kantor, membiayai biaya operasional dan gaji Perangkat Kampung, dan mengadakan pelatihan Perangkat Kampung. Simpulan, Proses implementasi Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kampung Muara Asa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci :** Alokasi Dana, Dana Kampung, Kebijakan, *Logic Model*

### ABSTRACT

*The aim of this research is to evaluate village fund management policies and village fund allocation in Muara Asa Village, Barong Tongkok District, West Kutai Regency using a logic model. This type of research is qualitative with a case study approach. The results of the research show that village funds in Muara Asa Village are used to build infrastructure such as building village roads every year, building village bridges, building physical facilities and infrastructure for village government offices, building health facilities and infrastructure, building and rehabilitating clean water sources, maintaining farming roads. , construction of road infrastructure such as sewers, and construction of public latrines (MCK). Village Fund allocations are used to improve Village Government services by building office infrastructure, financing operational costs and salaries for Village Officials, and holding training for Village Officials. Conclusion, the process of implementing Village Funds and Village Fund Allocation in Muara Asa Village is going well and in accordance with community needs.*

**Keywords:** Fund Allocation, Logic Model, Policy, Village Funds

### PENDAHULUAN

Semenjak dikeluarkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat pandangan mengenai pengaturan dan pelaksanaan tata kelola desa berubah. Sebelum ada peraturan tersebut, Desa menjadi objek pembangunan saja. Namun, setelah ada peraturan tersebut Desa menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, Buku Saku Dana Desa, 2017). Hal ini menuntut pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam pengelolaan kepentingan publik masyarakat desa (Rulinawaty, Samboteng, et al., 2021). Sebagai lingkup terkecil maka desa mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penyalur antara pemerintah

dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat karena pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa (Boedijono, et al., 2019).

Sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah juga memberikan otoritas lebih tinggi kepada desa termasuk dalam hal keuangan melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Chehafudin et al., 2022). Dana Desa dapat dikategorikan sebagai hibah pendamping atau bantuan keuangan (Akbar & Sihaloho, 2019). Dana Desa berfungsi antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, mengatasi kesenjangan antar desa, dan sekaligus pemerataan pembangunan (Chehafudin et al., 2022). Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota yang bersangkutan (Kemenkeu, Buku Pintar Dana Desa, 2019).

Kemudian, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Besaran minimal Alokasi Dana Desa adalah minimal 10% dari Dana Perimbangan (DAU+DBH) setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBD (Kemenkeu, Buku Pintar Dana Desa, 2019). Kemudian, tata cara pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017. Berdasarkan peraturan tersebut, pengalokasian Dana Desa mengacu pada letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tatacara penganggaran dana desa setiap daerah kabupaten/ kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk semua desa, selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui berapa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggal (Boedijono, et al., 2019).

Setelah proses implementasi kebijakan, tahapan evaluasi kebijakan menjadi salah satu rangkaian penting yang perlu dilakukan (Rulinawaty, 2013). Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum tercapai dari sebuah program (Rulinawaty, Samboteng, et al., 2021). Informasi hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program tersebut. Dengan kata lain evaluasi akan diketahui efektifitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya sekaligus untuk meningkatkannya (Rulinawaty et al., 2020). Arti penting dari pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah untuk melihat kembali apakah suatu program dan kebijakan pendidikan itu telah dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dari hasil kegiatan evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai dan apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi kemudian diambil keputusan apakah program dan kebijakan tersebut akan: (1) diteruskan, (2) direvisi, (3) dihentikan, atau (4) dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya (Hajaroh, 2018).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai evaluasi kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Boedijono et al., (2019) mengenai efektifitas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso. Penelitian tersebut menggunakan *mix method* yakni metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih

belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya (Boedijono, et al., 2019).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Chehafudin et al., (2022) dengan fokus penelitian evaluasi kebijakan Dana Desa untuk penganggulangan kemiskinan dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar air minum serta sanitasi Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan *path analysis*. Hasil penelitian ini adalah 1) Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara nasional meski kontribusinya sangat kecil dan pengaruhnya tidak signifikan pada kabupaten/kota berkapasitas fiskal rendah. 2) Dana Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan cakupan air minum secara nasional tapi tidak signifikan, namun pengaruhnya signifikan pada kabupaten/kota berkapasitas fiskal sedang atau rendah dengan kemiskinan rendah. 3) Dana Desa berpengaruh terhadap peningkatan sanitasi namun tidak signifikan secara nasional maupun seluruh kabupaten/kota. 4) Dana Desa untuk air minum berpengaruh tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara nasional dan untuk seluruh kabupaten/kota. 5) Dana Desa untuk sanitasi tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan secara nasional maupun seluruh kabupaten/kota tapi berpengaruh tidak signifikan pada kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal dan kemiskinan rendah (Chehafudin et al., 2022).

Sehingga, untuk memperoleh eksplorasi terkait kebijakan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung, proses evaluasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis *logic model*. *Logic model* merupakan gambaran logis suatu program/kegiatan yang menjadi satu rangkaian hubungan sebab-akibat antara *input*, aktivitas, *output*, dan *outcome* yang ingin dicapai sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditentukan suatu organisasi (Rulinawaty, 2013). *Logic model* dapat diterapkan baik untuk penyusunan program baru maupun program yang sudah ada. *Logic model* membantu memperjelas cara sebuah program menyelesaikan masalah dalam batasan asumsi tertentu dan membantu dalam mengembangkan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja (Fitrianty & Biswan, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan perangkat Kampung Muara Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk mengetahui mengenai penerapan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung di kampung tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (Rulinawaty; Siti Aisyah, 2023). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model analisis interaktif milik Miles & Huberman.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Penggunaan Dana Kampung di Kampung Muara Asa Tahun 2018-2021**

Tujuan jangka pendek dari implementasi Dana Kampung pada tahun 2018 hingga 2021 berfokus pada kegiatan masyarakat Kampung Muara Asa dapat berjalan dengan baik. Dibangunnya beberapa infrastruktur atau fasilitas umum dengan menggunakan Dana Kampung dalam jangka pendeknya diharapkan bisa mempermudah semua kegiatan masyarakat Kampung Muara Asa. Pada rentang tahun tersebut, beberapa

kebutuhan dasar masyarakat Kampung Muara Asa mulai dibangun. Dalam bidang kesehatan, dilaksanakan posyandu. Kemudian, dibangun beberapa fasilitas umum dasar seperti sumber air bersih, jamban umum (MCK), jalan usaha tani dan jalan kampung. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari Eliyakum, S.Pd selaku Kepala Kampung Muara Asa berikut :

*“Tujuan jangka pendeknya di tahun tersebut ya agar kebutuhan fasum masyarakat Kampung Muara Asa bisa terpenuhi dan proses pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Desa berjalan dengan baik.”*

Setelah tercapainya tujuan jangka pendek, terdapat tujuan jangka menengah dari implementasi Dana Kampung. Tujuan jangka menengah dari pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di Kampung Muara Asa berfokus pada mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mencapai kemudahan akses fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara oleh Eliyakum, S.Pd. selaku Kepala Kampung Muara Asa berikut.

*“Tujuan jangka menengahnya untuk penerapan Dana Kampung dan Dana Alokasi Kampung di Kampung Muara Asa adalah memudahkan akses pelayanan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran juga. Saat ini sedang diusahakan mencapai tujuan tersebut seperti dengan membangun jalan dan jembatan agar kegiatan perekonomian masyarakat semakin baik dan masyarakat Muara Asa lebih mudah dalam mencari kerja atau mata pencaharian.”*

Kemudian tujuan jangka panjang dalam implementasi Dana Kampung di Kampung Muara Asa berpatokan pada tujuan Dana Kampung itu sendiri yakni untuk mencapai masyarakat kampung yang sejahtera dan pemerataan pendapatan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Eliyakum, S.Pd. selaku Kepala Kampung Muara Asa berikut.

*“Tujuan jangka panjang yang diharapkan dari saya selaku Kepala Kampung dan Pemerintah Desa adalah tercapainya masyarakat Kampung Muara Asa yang sejahtera dan tidak tertinggal lagi. Kemudian, taraf hidup masyarakat semakin baik karena sudah tercapai pemerataan pendapatan.”*

Tujuan jangka pendek, menengah dan panjang dari pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum tersebut digunakan untuk melihat dampak dari implementasi Dana Kampung. Sehingga, tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi acuan Perangkat Kampung dalam melakukan implementasi Dana Kampung hingga menjadi infrastruktur atau fasilitas umum yang bisa digunakan oleh masyarakat kampung.

Kebijakan Dana Kampung telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendes 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan Dana Kampung serta PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung bersumber dari APBN. Kemudian implementasi Dana Kampung berasal dari pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dari DAU dan DBH yang besarnya disesuaikan dengan jumlah penduduk setiap kampung, jumlah kemiskinan, IKK, dan luas wilayah kampung (Kemenkeu, Buku Saku Dana Desa, 2017).

Kampung Muara Asa menjadi salah satu kampung yang memperoleh Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Kampung Muara Asa memiliki luas wilayah Kampung Muara Asa adalah 20,48 km<sup>2</sup>. Dalam wilayah tersebut tercatat jumlah penduduk pada tahun 2020 hingga 2021 berjumlah 721 jiwa. Pada tahun 2018-2021 implementasi Dana Kampung,

menggunakan dasar kebijakan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan dalam implementasi Alokasi Dana Kampung menggunakan Perbup No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

Dana Kampung diimplementasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas dasar untuk masyarakat Kampung Muara Asa. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa memerlukan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum sosial yang memadai (Maryati, et al., 2022). Sehingga, pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum perlu dilakukan. Di Kampung Muara Asa selama tahun 2018-2021 terdapat beberapa infrastruktur atau fasilitas umum yang dibangun seperti pembangunan dan rehabilitasi jalan kampung setiap tahun, pembangunan jembatan kampung, pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor Pemerintahan Kampung, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sumber air bersih, pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan prasarana jalan seperti selokan, dan pembangunan jamban umum (MCK).

Berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun memiliki tujuan jangka pendek, menengah dan panjang (Samboteng & Rulinawaty, 2019). Tujuan jangka pendeknya adalah mempermudah semua kegiatan masyarakat Kampung Muara Asa. Tujuan jangka menengahnya adalah mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mencapai kemudahan akses karena dibangunnya fasilitas. Terakhir, tujuan jangka panjangnya adalah mencapai masyarakat yang sejahtera dan pemerataan pendapatan. Hasil penelitian mengenai tujuan diimplementasikannya Dana Kampung di Kampung Muara Asa ini sejalan dengan tujuan Dana Desa yang berdasarkan pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yakni 1) meningkatkan pelayanan publik di kampung; (2) mengentaskan kemiskinan; (3) memajukan perekonomian kampung; (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antar kampung; serta (5) memperkuat pembangunan masyarakat desa (Yamin, 2021).

Kemudian, selain Dana Kampung terdapat Alokasi Dana Kampung. Alokasi Dana Kampung yaitu dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang paling sedikit 10% yang telah dikurangi dana alokasi khusus yang bersumber langsung daerah APBD (Anggara, 2021). Alokasi Dana Kampung merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi Dana Kampung dibagi menjadi 2 rincian, rincian yang pertama sebesar 70% untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik sedangkan yang kedua sebesar 30% digunakan untuk aparatur pemerintah kampung (Purbasari et al., 2018). Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang baik dan ideal akan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kampung, apalagi juga telah dijelaskan tentang kewenangan kampung terkait pemberian pelayanan masyarakat kampung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Pemerintahan Kampung bisa digambarkan sebagai suatu organisasi pemerintahan, organisasi ini memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat kampung (Rulinawaty; dkk, n.d.) sehingga keberadaannya memiliki peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu kampung (Mahardika & Suseno, 2018). Di Kampung Muara Asa, Alokasi Dana Kampung digunakan untuk peningkatan pelayanan Pemerintah Kampung dengan cara membangun sarana dan prasarana kantor yang memadai, membiayai biaya operasional dan gaji Perangkat Kampung, dan mengadakan pelatihan Perangkat Kampung. Selain

penyelenggaraan Pemerintah Kampung yang baik, kegiatan pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan untuk keberlangsungan Kampung Muara Asa.

### **Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Muara Asa**

Tujuan jangka pendek dari implementasi Alokasi Dana Kampung pada tahun 2018 hingga 2021 berfokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik (Rulinawaty et al., 2022). Pada rentang tahun tersebut, kegiatan atau program operasional Pemerintah Kampung berkembang dengan menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung. Selain itu, terdapat beberapa program yang ditujukan untuk masyarakat sehingga masyarakat Kampung Muara Asa bisa semakin berkembang dan maju. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari Kornelius S.Pd., M.Si. selaku Ketua BPK Kampung Muara Asa berikut.

*“Untuk tujuan jangka pendeknya saya rasa pelaksanaan layanan Pemerintah Desa yang lebih baik, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik juga. Jadi masyarakat disini bisa lebih terbuka dan berkembang jadi bisa menjadi masyarakat yang lebih maju sedikit demi sedikit.”*

Setelah tercapainya tujuan jangka pendek, terdapat tujuan jangka menengah dari implementasi Alokasi Dana Kampung. Tujuan jangka menengah dari implementasi Alokasi Dana Kampung pada tahun 2018 hingga 2021 berfokus pada memupuk kesadaran masyarakat untuk berkembang dan maju dan kemudahan akses oleh masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan dari Pemerintah Kampung. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara oleh Masykur, S.Pd. selaku Kepala Adat berikut.

*“Dalam jangka menengahnya, pembinaan dari lembaga adat yang Alokasi Dana Kampung menurut saya tujuan utamanya adalah menumbuhkan sikap gotong royong dan sopan santun di masyarakat. Pelayanan dari perangkat kampung juga diharapkan semakin cepat dan mudah digunakan oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.”*

Kemudian tujuan jangka panjang dalam implementasi Alokasi Dana Kampung di Kampung Muara Asa berpatokan pada tujuan Alokasi Dana Kampung itu sendiri yakni untuk masyarakat Kampung Muara Asa mencapai kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan dan pelayanan Pemerintah Kampung yang memadai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Eliyakum, S.Pd. selaku Kepala Kampung Muara Asa berikut.

*“Tujuan jangka panjang yang diharapkan dari saya selaku Kepala Kampung dan Pemerintah Desa adalah tercapainya masyarakat Kampung Muara Asa yang sejahtera dan tidak tertinggal lagi. Kemudian, taraf hidup masyarakat semakin baik karena dipenuhinya kebutuhan terkait pemberdayaan masyarakat dan pelayanan pemerintahan yang baik.”*

Tujuan jangka pendek, menengah dan panjang dari pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum tersebut digunakan untuk melihat dampak dari implementasi Dana Kampung. Sehingga, tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi acuan Perangkat Kampung dalam melakukan implementasi Alokasi Dana Kampung hingga menjadi sebuah program atau kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan Pemerintah Kampung dan mengembangkan masyarakat Kampung Muara Asa. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Samboteng et al., 2022). Arah

pemberdayaan masyarakat kampung yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat kampung dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing (Fathony et al., 2019). Saat ini, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Mara Asa sudah melibatkan masyarakat secara langsung. Berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung tersebut diantaranya yakni memberikan pembinaan terkait ketertiban dan keamanan, peningkatan pendidikan masyarakat, PKK, lembaga adat, LPK, dan karang taruna. Berbagai pembinaan tersebut diharapkan bisa membuat masyarakat Kampung Muara Asa lebih berdaya dan berkembang.

Berbagai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Kampung Muara Asa memiliki tujuan baik jangka pendek, menengah, hingga panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah untuk pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan berjalan dengan baik (Rulinawaty, Risnashari, et al., 2021). Tujuan jangka menengahnya adalah untuk memupuk kesadaran masyarakat agar mau berkembang dan maju serta adanya kemudahan akses pelayanan pemerintahan oleh masyarakat. Terakhir, tujuan jangka panjangnya adalah masyarakat Kampung Muara Asa mencapai kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan dan pelayanan Pemerintah Kampung yang memadai. Hal ini sejalan dengan tujuan Alokasi Dana Kampung secara umum yakni (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan serta kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kampung. (3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, serta (4) Mendorong untuk lebih meningkatkan swadaya gotongroyong masyarakat (Harahap, 2021).

Proses implementasi Dana Kampung dan Dana Alokasi Kampung dengan *input* dana, SDM dan dasar kebijakan kemudian diproses menjadi sebuah kebijakan atau program. Dimana, kebijakan atau program tersebut akhirnya menjadi *output* dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum dan pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Kampung Muara Asa. Selanjutnya, *ouput* yang sudah diimplementasikan akan menghasilkan *outcume* yakni tujuan yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat tersebut. Pencapaian *outcome* tersebut akhirnya memberikan dampak bagi pelaksanaan Pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung. Dalam implementasi Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung di tahun 2018-2021,

Pemerintah Kampung dan masyarakat merasa memperoleh dampak baik karena banyak infrastruktur atau fasilitas umum baru yang dibuat dan selalu dilaksanakan perbaikan atau rehabilitasi agar terus bisa digunakan dengan baik. Selain itu, terdapat berbagai pembinaan yang melibatkan masyarakat secara langsung sehingga masyarakat Kampung Muara Asa dapat lebih berkembang dan maju. Garis besar pembahasan mengenai evaluasi Dana Kampung dan Dana Alokasi Kampung menggunakan *logic model* di Kampung Muara Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tahun 2018-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

## SIMPULAN

Bahwa Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kampung Muara Asa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat dengan tujuan jangka pendek mempermudah aktivitas masyarakat dan memastikan pemerintahan berjalan baik, tujuan jangka menengah mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesadaran dan akses layanan, dan tujuan jangka panjang menciptakan kesejahteraan serta pemerataan pendapatan. Implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perangkat kampung, serta terus dilaksanakan guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. T., & Sihalo, E. D. (2019). The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia. *Media Trend*, 194-200.
- Ambarwati, K. (2022). *Dana Desa dan Pengaruhnya Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pesawaran*. Lampung: Universitas Lampung.
- Anggara, A. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Syntax Admiration*, 377-387.
- Arina, Seska, A. I., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22-41.
- Astika, Nyoman, A., & Subawa, N. S. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 223.
- Boedijono, Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, 9-20.
- Chehafudin, M., Wibawa, S., & Wibobo, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Air Minum serta Sanitasi Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 374-387.
- Diansari, R. E. (2017). Analisis Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Metode Logic Model (Studi pada Desa Pateken Kec. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 950-960.
- Elfahdi, A., Mardiyani, Y., Sasmito, Y., & Budiati, R. (2021). Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengaruh Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Perencanaan Pembangunan dan Inovasi*, 36-52.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 41-57.
- Fitrianty, D., & Biswan, A. T. (2018). Praktik Sistem Penganggaran Melalui Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 34-46.
- Garini, N. A., Ramadhan, S. H., Aliyyah, I. N., Ramadhan, S., Rafinda, I., & Sukmawati, E. (2023). Evaluasi Program Keluarga Harapan dengan Logic Model



- di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humiora dan Kebijakan Publik*, 43-63.
- Hajaroh, M. (2018). Pohon Teori Evaluasi Kebijakan dan Program (Metode, Nilai dan Menilai, Penggunaan). *Foundasia*, 27-41.
- Handayan. (2019, April 11). *Hanya 5 Ribu Perbulan, Warga Kampung Muara Asa Sudah Bisa Nikmati Air Bersih*. Retrieved from Korankaltim.com: <https://korankaltim.com/kaltimtara/read/22548/hanya-5-ribu-perbulan-warga-kampung-muara-asa-sudah-bisa-nikmati-air-bersih>
- Harahap, A. Y. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal of Economics and Accounting*, 151-157.
- Hardianto. (2022). Determinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 266-275.
- Hariyanto, S., & Mutiarin, D. (2015). Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011 – 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 560-593.
- Hidayat, T. (2019). Pembahasan Studi Kasus sebagai Bagian Metodologi Penelitian. *Jurnal Study Kasus*, 1-12.
- Kemenkeu. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. (2019). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mahardika, M. G., & Suseno, H. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Transformative*, 57-67.
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar: Kebijakan Publik*. Probolinggo: Universitas Panca Marga.
- Maryati, S., Kasim, M., Antula, F., Pidur, R. I., Rahman, R., Sianturi, D. J., . . . Maloho, A. R. (2022). Pemetaan Fasilitas Umum dan Sosial Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan di Desa Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 90-95.
- Nasution, F. A. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dengan Alokasi Dana Desa Dan Kebijakan Desa. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 24-30.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik. Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purbasari, H., Wardana, B. W., & Pangestu, I. A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *University Research Colloquium*, 281-287.
- Rarung, J., Pioh, N., & Waworundeng, W. (2019). Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa). *Jurnal Eksekutif*, 1-15.
- Rulinawaty; Dkk. (N.D.). *Kompleksitas Dan Dinamika Birokrasi Di Indonesia* (Alvian Rac). CV. Literakata Karya Indonesia, Karanganyar 2023.
- Rulinawaty; Siti Aisyah. (2023). *Studi Mandiri* (Issue May).

- Rulinawaty. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan*. 104.
- Rulinawaty, Aripin, S., Samboteng, L., & Andriyansah. (2020). Capacity Building Model Of Governance Participatory Network: How Community-Based Organization Is Changing The Culture Of Local Governance In Indonesia. *International Journal Of Management (Ijm)*, 11(12), 1786–1799. <https://doi.org/10.34218/Ijm.11.12.2020.164>
- Rulinawaty, R., Darajat, O., & Sudrajat, A. (2022). Collective Organizational Engagement to Enhance Organizational Performance: Case of Indonesia Office Services. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 26(2), 127–143. <https://doi.org/10.22146/JKAP.66886>
- Rulinawaty, R., Risnashari, R., & Lince, R. (2021). “Orang Kampung”, Pemasaran Digital, Dan Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Dan Agenda Penelitian. Studi Kasus : Pemasaran Tradisional Songko Recca. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 575–585. <https://doi.org/10.31764/JPMB.V5I1.6509>
- Rulinawaty, Samboteng, L., Aripin, S., Kasmad, M. R., Harta, R., Susanti, A., & Fadillah, S. (2021). Accountability Performance Public Service: Community Based Organization Solution for Base Public Service. *Proceedings of the First International Conference on Science, Technology, Engineering and Industrial Revolution (ICSTEIR 2020)*, 536(Icsteir 2020), 238–243. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210312.037>
- Samboteng, L., & Rulinawaty. (2019). Red Tape It’s Heaven For Bureaucratic Public Services A Case Study On Trade In Services Business License Of Makassar City. *International Journal Of Social Science And Humanities Research*, 2(8), 1–12. [www.ijournal.com](http://www.ijournal.com)
- Samboteng, L., Rulinawaty, Kasmad, M. R., Basit, M., & Rahim, R. (2022). Market Basket Analysis Of Administrative Patterns Data Of Consumer Purchases Using Data Mining Technology. *Journal Of Applied Engineering Science*, 20(2), 339–345. <https://doi.org/10.5937/JAES0-32019>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 648-651.
- Veronica, D., Winarni, E., & Soleh, A. (2020). Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Maju Jaya Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo). *Jurnal Manajemen dan Sains*, 318-322.
- Yamin, A. (2021). Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 246-255.